

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang gender dan ketimpangan dalam dunia jurnalistik telah banyak dilakukan, terutama dalam memahami bagaimana perempuan jurnalis mengalami diskriminasi di tempat kerja. Beberapa studi menyoroti berbagai bentuk ketimpangan, mulai dari bias dalam penugasan liputan, kesenjangan promosi jabatan, hingga perbedaan gaji berdasarkan gender.

Herawati (2016) dalam penelitiannya di media Jawa Barat menemukan bahwa meskipun perempuan jurnalis menganggap diri mereka setara dengan laki-laki dalam aspek profesional, mereka masih menghadapi tekanan peran domestik yang membatasi mobilitas karir mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Bire, Mas'amah, dan Hana (2019) yang menunjukkan bahwa perempuan jurnalis di Kupang tetap menghadapi bias gender dalam pekerjaan mereka, meskipun memiliki profesionalisme tinggi.

Sementara itu, penelitian Lobo dkk (2016) mengungkapkan bahwa meskipun dewasa ini jumlah perempuan jurnalis meningkat, mereka masih terpinggirkan dalam ruang redaksi dan menghadapi tantangan dalam mencapai posisi kepemimpinan. Konsep *glass ceiling*, menggambarkan hambatan tak terlihat dalam promosi jabatan bagi perempuan, menjadi fenomena yang signifikan dalam studi ini.

Dalam konteks identitas profesional perempuan jurnalis, penelitian Widiarini dkk (2018) mengkaji bagaimana jurnalis televisi perempuan di Bandung menghadapi ekspektasi gender yang kuat, terutama dalam aspek penampilan dan perilaku. Hal ini sejalan dengan studi Meidina dkk (2024) yang menemukan bahwa identitas perempuan jurnalis terbentuk melalui interaksi sosial di lingkungan kerja, di mana bias gender sering kali menekan ekspresi identitas mereka.

Selain itu, penelitian Stellarosa dan Silaban (2019) menyoroti bagaimana stereotip gender memengaruhi peran perempuan di media, di mana perempuan sering kali ditempatkan dalam liputan berita yang lebih ringan seperti gaya hidup dan hiburan, sementara posisi strategis di redaksi didominasi oleh laki-laki. Dalam penelitian ini, *Muted Group Theory* digunakan untuk menganalisis bahwa perempuan sering kali tidak memiliki ruang untuk berbicara dalam lingkungan maskulin, digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Salah satu aspek penting dalam studi gender dan jurnalistik adalah pengalaman kekerasan dan pelecehan yang dialami perempuan jurnalis saat bekerja. Studi oleh Asnaura dkk (2021) menemukan bahwa perempuan jurnalis di Indonesia sering menghadapi pelecehan seksual saat meliput berita di lapangan, serta mengalami diskriminasi dalam aspek upah dan fasilitas kerja. Hal ini diperkuat oleh penelitian Hidayah dkk (2024), yang menyoroti dampak pengalaman traumatis akibat kekerasan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan perempuan jurnalis.

Dalam konteks media online, penelitian Silaban dan Septiana (2020) menemukan bahwa budaya patriarki masih mengakar kuat dalam *newsroom* digital, di mana laki-laki cenderung menguasai posisi editorial dan manajemen, sementara perempuan lebih sulit menembus jenjang karir yang lebih tinggi. Studi ini menyoroti bagaimana diskriminasi berbasis gender tetap menjadi tantangan utama bagi perempuan jurnalis di era digital.

Sementara dari perspektif komunikasi, penelitian Kadrina dkk (2023) mengkaji bagaimana perempuan jurnalis dan laki-laki berinteraksi dalam *newsroom*. Meskipun ditemukan bahwa relasi komunikasi cukup setara dalam aspek spontanitas dan kredibilitas, perempuan masih sering dikecualikan dari liputan di medan berbahaya. Ini menunjukkan adanya bias struktural dalam organisasi media, di mana perempuan jurnalis dipersepsikan kurang kompeten untuk menangani liputan tertentu.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak studi telah membahas ketidaksetaraan gender dalam dunia jurnalistik, namun belum banyak yang menggali pengalaman dan pemaknaan langsung dari perempuan jurnalis terkait pengalaman mereka saat dihadapkan dengan isu gender di ruang kerja media online, termasuk bagaimana cara perempuan jurnalis melakoni kerja lapangan yang menuntut multitasking. Kebanyakan penelitian berfokus pada aspek struktural dan sistemik, sementara perspektif fenomenologis yang menyoroti pengalaman subjektif perempuan jurnalis masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana pengalaman perempuan jurnalis media online yang dituntut multitasking ketika melakukan peliputan di lapangan maupun ruang redaksi. Di samping itu, dia masih harus menghadapi konflik peran terkait gender karena pekerjaan domestiknya sebagai perempuan.



Tabel 2 .1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul & Peneliti	Isu	Konsep/Teori (Variabel/Dimensi)	Metode & Informan	Temuan/ Diskusi	Keterbatasan/ Rekomendasi
1.	Judul: Pemaknaan Gender Perempuan Pekerja Media di Jawa Barat Peneliti: Maimon Herawati Penerbit: Jurnal Kajian Komunikasi, Vo. 4 No. 1, Juni 2016	Peran gender dan tantangan yang dihadapi oleh pekerja media perempuan di Jawa Barat.	Penelitian ini mengeksplorasi konsep peran gender dalam lingkungan profesional pekerja media, dengan fokus pada konstruksi gender di kalangan perempuan di media. Dimensi yang dianalisis meliputi persepsi kesetaraan gender, peran profesional vs. domestik, dan peran dukungan keluarga.	Pendekatan fenomenologi, metode kualitatif, wawancara, dan observasi dengan pekerja media perempuan di Jawa Barat, dan <i>literature review</i> .	Penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja media perempuan melihat diri mereka setara dengan laki-laki, meskipun mengakui adanya perbedaan fisik. Beberapa masih merasakan tekanan untuk memenuhi peran domestik, namun yang lain menantang pandangan tersebut. Profesionalisme diseimbangkan dengan tanggung jawab domestik, yang mengarah pada gangguan karier saat terjadi benturan.	Penelitian ini merekomendasikan integrasi pelatihan berbasis gender dalam kurikulum jurnalistik dan meningkatkan struktur dukungan keluarga untuk membantu perempuan jurnalis mengelola tanggung jawab profesional dan pribadi.
2.	Judul: Women WILL Never Be Equal to Men: Examining Women Journalist Experiences of Patriarchy and Sexism in South Africa Peneliti: Genevieve Govender dan Tigere P Muringa	Seksisme dan patriarki yang dihadapi perempuan jurnalis di Afrika Selatan	<i>Feminist Media Theory</i> dan <i>Intersectionality</i> dengan dimensi: 1) Seksisme (diskriminasi berbasis gender), 2) Patriarki (struktural sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki di posisi dominan), 3) Kesetaraan gender dalam profesi jurnalistik	Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menggunakan wawancara semi-struktural dengan 11 jurnalis radio SABC di berbagai provinsi Afrika Selatan	Mengungkap bahwa perempuan jurnalis sering kali diabaikan, tidak dihargai, dan mendapatkan akses terbatas terhadap sumber berita penting dibandingkan rekan pria mereka. Menyimpulkan bahwa patriarki dan seksisme sangat menghambat karir mereka	Terdapat keterbatasan dalam jumlah informan yang berpartisipasi, yang mempengaruhi generalisasi temuan. Rekomendasi untuk melibatkan lebih banyak jurnalis dalam studi serupa untuk memperoleh pandangan yang lebih luas

	Penerbit: Jounalism and Media, Vol 6 No. 1, 2025					
3.	Judul: <i>The Many Shades of Sexism: Female Journalists in Leadership Positions Reflect on Barriers to Career Advancement in Journalism</i> Penulis: Maria Urbanikova dan Tereza Caladi Penerbit: Journalism & Mass Communication Quarterly, 2024	Gender inequality, diskriminasi dalam karir, seksisme, budaya ruang redaksi yang maskulin	Teori feminis, diskriminasi gender, seksisme dalam ruang redaksi, pengaruh norma sosial terhadap karir	Penelitian kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur kepada 17 jurnalis wanita di posisi kepemimpinan di Republik Ceko	Terdapat lima hambatan utama untuk karir wanita: ketidaksetaraan gender dalam masyarakat, tanggung jawab keluarga, rendahnya harga diri dan ambisi, seksisme, dan budaya ruang redaksi maskulin. Wanita di posisi kepemimpinan lebih fokus pada cara mengelola situasi daripada mengubahnya.	Dukungan lebih dari manajemen, pelatihan untuk wanita pasca cuti melahirkan, mentoring, lebih banyak peran model wanita dalam kepemimpinan.
4.	Judul: <i>The perception of women journalists about their job. The gender variable in professional culture</i> Penulis: Roberto de-Miguel-Pascual, Sonia Parratt Fernandez, dan Rosa Berganza Penerbit: RLCS (Revista Latina de	Perbedaan persepsi antara jurnalis pria dan wanita dalam fungsi profesional dan etika jurnalisme	Teori feminis media, Teori budaya profesional jurnalisme, <i>Gendered Nature of Journalism</i>	Penelitian kuantitatif berbasis survei dengan analisis perbandingan antara jurnalis pria dan wanita. Survei menggunakan kuesioner tertutup dengan sampel representatif dari 124 media di Spanyol. 390 jurnalis (termasuk pria dan wanita)	Wanita lebih merasakan tekanan dari kepentingan bisnis, kebijakan pemerintah, dan pengaruh politik dibandingkan pria. Jurnalis wanita yang lebih berdaya memiliki otonomi lebih besar dalam pengambilan keputusan editorial dan pemilihan topik.	Penelitian hanya dilakukan di Spanyol, rekomendasi untuk memperluas penelitian ke negara lain dan melakukan analisis lebih dalam terhadap budaya jurnalisme digital.

	Communicacion Social), 2019					
5.	<p>Judul: Pemaknaan Perempuan Jurnalis Televisi di Kota Bandung Terhadap Profesi Jurnalis</p> <p>Peneliti: Anissa Dea Widiarini, Siti Karlina, Maimon Herawati</p> <p>Penerbit: Jurnal Kajian Jurnalisme, Vol. 2 No.1, 2018.</p>	<p>Bias gender dan tantangan profesional yang dihadapi oleh perempuan jurnalis di televisi di Bandung.</p>	<p>Fokus pada dinamika gender di tempat kerja, terutama dalam profesi media yang cenderung maskulin.</p> <p>Teori yang digunakan adalah Teori konstruksi sosial terhadap realitas Berger dan Luckmann. Mencakup bahasan tentang peran gender, budaya media, dan profesionalisme dalam kondisi gendered.</p>	<p>Kualitatif, dengan wawancara semi-terstruktur dengan perempuan jurnalis televisi di Bandung.</p>	<p>Perempuan jurnalis di televisi menghadapi tantangan besar karena maskulinitas profesi tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun lebih banyak perempuan yang memasuki bidang ini, mereka masih didominasi di posisi bawah dengan kemajuan karir yang terbatas. Mereka juga dihadapkan pada ekspektasi gender terkait penampilan dan perilaku.</p>	<p>Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan dukungan bagi perempuan di posisi kepemimpinan dan mengatasi bias gender dalam organisasi media agar memungkinkan perkembangan karir yang lebih adil.</p>
6.	<p>Judul: <i>In Journalism We Are All Men</i></p> <p>Peneliti: Paula Lobo, Maria João Silveirinha, Marisa Torres da Silva, Filipa Subtil</p> <p>Penerbit: Journalism Studies by Routledge Taylor & Francis Group, January 2016.</p>	<p>Diskriminasi gender dalam ruang redaksi dan praktik jurnalistik.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami bagaimana perempuan jurnalis dan laki-laki merasakan dan mengungkapkan peran gender di ruang redaksi.</p> <p>Dimensi yang dianalisis mencakup perbedaan gender dalam kehidupan profesional, praktik dan norma dalam jurnalisme,</p>	<p>Wawancara semi-terstruktur dengan 18 jurnalis Portugal, dianalisis melalui lensa fenomenologi dan feminis.</p>	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun jumlah perempuan jurnalis meningkat, mereka masih terpinggirkan dalam ruang redaksi, terutama dalam posisi-posisi pengambil keputusan. Perbedaan gender masih ada dalam persepsi terhadap pekerjaan jurnalis, dengan perempuan jurnalis sering kali harus membuktikan diri mereka lebih baik daripada laki-laki di dunia kerja yang maskulin ini.</p>	<p>Rekomendasi termasuk mengatasi penghalang struktural dalam karir perempuan jurnalis dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di ruang redaksi.</p>

			serta identitas profesional.			
7.	<p>Judul: Women, Journalism, and Discrimination In Indonesia Digital Media</p> <p>Peneliti: Asnaura, Nisrina Zahrani, dan Sarah Alifia Suryadi</p> <p>Penerbit: Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 2 No. 2, Desember 2021</p>	<p>Diskriminasi gender dalam pekerjaan perempuan jurnalis yang meliputi penghalangan kesempatan kerja dan pelecehan di lapangan.</p>	<p>Penelitian ini mengeksplorasi terkait kesetaraan gender dalam jurnalistik. Yakni terkait diskriminasi berbasis gender (perbedaan upah, penempatan posisi, fasilitas tidak memadai, pelecehan saat liputan).</p> <p>Teori Feminisme dan Kritis digunakan untuk memahami konstruksi sosial yang mempertahankan diskriminasi.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka, observasi, analisis wacana kritis, dan sumber data sekunder berasal dari berita dan penelitian terdahulu.</p> <p>Sementara informannya berasal dari data sekunder berupa berita dan laporan terkait diskriminasi terhadap perempuan jurnalis, serta riset terdahulu.</p>	<p>Temuan menunjukkan bahwa diskriminasi masih sering terjadi dalam pemberian gaji, fasilitas, dan kesempatan promosi. Perempuan jurnalis sering mendapat kekerasan verbal atau fisik selama peliputan. Upaya yang dilakukan adalah mengangkat isu-isu kesetaraan gender dalam laporan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka.</p>	<p>Penelitian ini terbatas pada analisis wacana dan data sekunder yang mungkin tidak menggambarkan kondisi langsung di lapangan. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut agar menyertakan wawancara mendalam dengan perempuan jurnalis untuk menggali lebih jauh diskriminasi yang mereka hadapi.</p>
8.	<p>Judul: Studi Fenomenologi Mengenai Identitas dan Perspektif Perempuan jurnalis dalam industri media di Surabaya dalam Memaknai Profesi</p> <p>Penulis: Vania Shafa Meidina, Merry Fridha Tri Palupi, dan Teguh Priyo Sadono</p>	<p>Identitas dan perspektif perempuan jurnalis dalam industri media di Surabaya.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan Teori Interaksi Simbolik George Herbert Mead yang menjelaskan bahwa identitas perempuan jurnalis terbentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman kerja.</p> <p>Teori interaksi simbolik, dengan konsep dasar</p>	<p>Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah bahwa ada kendala dalam profesi ini meliputi bias gender, pelecehan seksual, dan batasan karier.</p>	<p>Informasi terbatas pada jurnalis di Surabaya, sehingga belum mewakili kondisi nasional.</p> <p>Perlu penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih luas dan metodologi kuantitatif</p>

	<p>Penerbit: Journal of Humanities and Social Studies, Vol. 2 No.1, Februari 2024</p>		<p>pikiran, konsep diri, dan masyarakat, diterapkan untuk memahami bagaimana informan merinci pengalaman dan makna profesi jurnalis.</p> <p>Adapun faktor pembentuk identitas, terdiri dari inspirasi dari idola, passion, petualangan, fleksibilitas profesi, eksistensi personal, dan pembuktian diri.</p>			
9.	<p>Judul: Konsep Diri Perempuan jurnalis (Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Traumatik Perempuan jurnalis Saat Menjalankan Profesinya)</p> <p>Penulis: Alifvia Nurul Hidayah, Abdul Malik, Liza Diniarizky Putri</p> <p>Penerbit: Komunikatif: Jurnal</p>	Pengalaman traumatis perempuan jurnalis akibat kekerasan, ancaman, dan pelecehan dalam profesinya.	<p>Penelitian ini menggunakan Teori Interaksi Simbolik, dimana konsep diri terbentuk dari pengalaman traumatis dan interaksi sosial.</p> <p>Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai pengaruh trauma terhadap profesionalisme dan</p>	<p>Menggunakan metode fenomenologi kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 5 perempuan jurnalis menggunakan teknik snowball sampling.</p>	<p>Perempuan jurnalis menghadapi berbagai bentuk kekerasan seperti pelecehan seksual, ancaman fisik, dan teror digital.</p> <p>Trauma yang dialami berdampak pada konsep diri, menyebabkan rasa takut, keraguan diri, atau justru meningkatkan ketahanan psikologis.</p> <p>Sementara perempuan jurnalis yang mengalami trauma,</p>	<p>Keterbatasan penelitian ini ada pada jumlah informan yang masih terbatas, sehingga perlu kajian lebih lanjut mengenai mekanisme coping yang efektif bagi perempuan jurnalis.</p>

	Ilmu Komunikasi, Vol. 13 No. 1, 2024		kesejahteraan perempuan jurnalis.		cenderung mengembangkan batasan personal untuk melindungi diri.	
--	---	--	--------------------------------------	--	---	--

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

UMN

20

Gender Sensitization..., Nuri Yatul Hikmah, Universitas Multimedia Nusantara

MULTIMEDIA
NU SANTARA

2.2 Konsep

2.2.1 Status dan Peran

2.2.1.1 Status dan Status Set

Status merupakan posisi sosial yang dimiliki seseorang yang dalam sehari-hari disebut “prestise”. Status merupakan bagian dari identitas sosial yang dapat membantu mendefinisikan hubungan seseorang dengan seseorang lainnya (Macionis, 2018). Dalam sosial masyarakat, status menjadi sebuah kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat yang didapat dengan sendirinya melalui usaha ataupun kaena pemberian (Nana, 2019). Dalam konteks sosial, status disamakan dengan kelas sosial, yakni pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas atau strata yang berbeda (Lubis dkk, 2024). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa status sosial merupakan kedudukan seseorang yang ada di masyarakat sesuai dengan hak dan tanggung jawab yang dimilikinya.

Setiap individu secara simultan menempati lebih dari satu status sosial. Keseluruhan status yang melekat pada seseorang dalam satu rentang waktu tertentu disebut sebagai *status set*. Status-status tersebut muncul dari berbagai ranah kehidupan sosial yang dijalani individu, baik dalam lingkup keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu (Macionis, 2018). Dengan demikian, satu individu dapat secara bersamaan menjalankan peran sosial yang berbeda sesuai dengan posisi yang dimilikinya dalam konteks sosial yang beragam.

Macionis (2018) mengungkap bahwa *status set* bersifat tidak statis dan akan mengalami perubahan sepanjang daur hidup individu. Perubahan usia, transisi pendidikan, pergeseran peran dalam keluarga, serta keterlibatan atau pelepasan diri dari organisasi dan dunia kerja berkontribusi pada bertambah atau berkurangnya status yang dimiliki seseorang. Rana (2022) memetakan hipotesis status set pada seorang perempuan yang memiliki status berbeda-beda sepanjang kehidupannya, dimana ia menjadi seorang anak, kemudian pelajar, mahasiswa, pekerja, anggota

keagamaan, masyarakat sipil, komunitas, ibu, dan istri. Hipotesis ini digambarkan olehnya sebagai sebuah identitas sosial yang penting dan sering kali membentuk keseluruhan hidup seseorang, dapat diberikan sejak lahir (*ascribed*) seperti status menjadi seorang anak, maupun dicapai melalui usaha (*achieved*) seperti dalam pekerjaan menjadi jurnalis (Macionis, 2018).

2.2.1.2 Peran dan Role Set

Konsep status dalam struktur sosial, berkelindan dengan peran (*role*) seseorang atau perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati suatu status tertentu. Dengan kata lain, individu menempati status sosial sekaligus menjalankan peran yang melekat pada status tersebut (Linton, 1937). Misalnya, status sebagai pekerja media, memiliki tuntutan peran berupa liputan, menulis berita, dan memproduksi karya jurnalistik lainnya. Pelaksanaan peran dalam praktiknya tidak pernah sepenuhnya seragam, karena dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian individu. Beberapa masyarakat juga memberikan ruang yang lebih besar bagi ekspresi personal dalam menjalankan peran, sementara masyarakat lainnya cenderung lebih normatif dan restriktif (Macionis, 2018).

Dalam konsep peran, terdapat istilah *role set* atau kumpulan peran yang melekat pada status tertentu dimana satu individu dapat memiliki beberapa status, dan setiap status tersebut terhubung dengan *role set* berbeda (Merton, 1968). Meron mencantohkan istilah ini seperti seorang perempuan yang berstatus sebagai profesor menjalankan peran sebagai pengajar dalam relasinya dengan mahasiswa, serta peran sebagai kolega dalam interaksinya dengan sesama akademisi. Dalam statusnya sebagai peneliti, ia menjalankan peran mengumpulkan dan menganalisis data melalui kegiatan kerja lapangan, sekaligus berperan sebagai penulis dalam memproduksi karya ilmiah. Di ranah domestik, status sebagai istri melibatkan peran perkawinan, seperti relasi emosional dan seksual dengan pasangan, serta peran domestik dalam pembagian kerja rumah tangga. Selain itu, status sebagai ibu mencakup tanggung jawab rutin terhadap anak-anak, sekaligus peran kewargaan (Macionis, 2018).

2.2.1.3 Role Strain dan Role Conflict

Individu mengalami konflik peran ketika mereka merasa tertarik ke berbagai arah saat berupaya merespons banyak status yang dimilikinya. Peran-peran yang melekat pada satu status tertentu tidak jarang menghadirkan tuntutan yang saling berkompetisi. Kondisi ini dikenal sebagai ketegangan peran atau *role strain*, yaitu situasi ketika berbagai ekspektasi peran yang berasal dari satu status yang sama menimbulkan tekanan internal (Macionis, 2018). Ia mencantohkan ketegangan peran ini dengan gambaran dimana seorang dosen perguruan tinggi dapat membangun relasi yang terbuka dan komunikatif dengan mahasiswa, namun secara bersamaan dituntut untuk mempertahankan batas profesional guna menjamin penilaian akademik yang objektif dan adil. Oleh karena itu, pemenuhan berbagai tuntutan peran dalam satu status sering kali menuntut kemampuan pengelolaan dan penyeimbangan peran yang kompleks.

Ketegangan peran juga merujuk pada kesulitan yang dirasakan, dialami sebagai beban, kelelahan, kehabisan energi, dan ketegangan dalam memenuhi ekspektasi peran yang umumnya terjadi karena merupakan konsekuensi dari konflik peran dan kelebihan beban peran (*role overload*) (Creary & Gordon, 2016). Karena alasan individual, situasional, atau individu yang mengalami ketegangan peran tidak memiliki sumber daya atau energi yang memadai untuk memenuhi tuntutan yang melekat pada satu atau lebih peran. Secara khusus, ketegangan peran berkaitan dengan reaksi psikologis dan fisiologis yang dapat mengancam kesejahteraan individu (Creary & Gordon, 2016).

Ketegangan peran memiliki tiga dimensi utama yang berkaitan dengan tuntutan dari keterlibatan individu dalam berbagai peran sosial. Ketegangan peran yang bersumber dari konflik peran terjadi ketika individu dihadapkan pada tuntutan peran yang saling bertentangan dan harus dipenuhi secara bersamaan. Ketegangan peran akibat kelebihan beban peran muncul ketika keterbatasan waktu dan kapasitas individu tidak memadai untuk mengakomodasi seluruh tuntutan peran yang ada. Adapun ketegangan peran berbasis penularan peran (*role contagion*) mengacu pada

kondisi ketika fokus kognitif dan emosional individu pada satu peran terbawa ke dalam pelaksanaan peran lainnya (Home, 1998).

Ketegangan peran dapat dialami dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan keluarga, dengan berbagai faktor pemicu yang beragam (Cox & Griffiths, 2010). Konflik antara peran kerja dan keluarga, serta kelebihan beban peran, kerap menghasilkan pengalaman subjektif berupa rasa terbebani, kelelahan, dan ketegangan baik dalam peran profesional maupun domestik (Kahn & Byosiere, 1992). Jam kerja yang berlebihan, ketidaksesuaian jadwal antara tuntutan kerja dan keluarga, serta meluasnya tuntutan pekerjaan ke ranah keluarga (*work spillover*) merupakan bentuk-bentuk ketegangan peran yang paling sering ditemukan dalam kedua ranah tersebut. Selain itu, ketegangan yang bersumber dari pekerjaan juga berpotensi memperparah munculnya ketegangan peran secara keseluruhan (Creary & Gordon, 2016).

Sementara itu, konflik peran (*role conflict*) merupakan sebuah konsep yang menggambarkan adanya konflik di antara peran-peran yang terkait dengan dua atau lebih status (Macionis, 2018). Konflik peran lahir di tengah masyarakat sebagai dampak dari pergeseran nilai mengenai peran sosial yang dijalankan individu dalam kelompok dan lapisan sosial tertentu (Yanti, Usman, & Bahrur, 2023). Konflik peran muncul ketika dua atau lebih peran sosial saling tumpang tindih dan tidak kompatibel. Konflik terjadi karena pelaksanaan satu peran menghambat atau mengganggu pelaksanaan peran lainnya (Creary & Gordon, 2016).

Tuntutan sosial dalam masyarakat mengharuskan individu menjalani peran sosial sesuai dengan situasi yang dihadapi, sehingga menciptakan kondisi di mana individu harus menjalani beberapa peran secara simultan. Hal ini menyebabkan individu mengalami konflik internal dalam menyesuaikan dan menentukan hak serta kewajiban dari berbagai peran yang dijalani. Karena itu, konflik peran intrapersonal ini muncul akibat tekanan peran yang berkaitan dengan peran dalam keluarga dan peran dalam profesi, sehingga memunculkan konflik peran ganda

akibat ketidakseimbangan peran pada kedua aspek tersebut (Ismiati & Zusmawati, 2020).

Konflik peran juga dapat terjadi ketika individu mengalami dua atau lebih tekanan secara bersamaan akibat menjalani beberapa peran sekaligus. Konflik yang sering muncul adalah pilihan untuk tetap konsisten dalam menjalankan peran-peran tersebut, karena dalam praktiknya beberapa peran memiliki tujuan dan ekspektasi yang saling bertentangan (Alfian, Adam, & Ibrahim, 2018).

Dalam dunia jurnalistik, konflik peran dialami oleh perempuan jurnalis yang memiliki tanggungjawab domestik di samping profesinya di lapangan. Risiko kerja jurnalis yang tinggi karena diidentikkan dengan lingkungan kerja yang maskulin, tidak membuat perempuan aman dari risiko yang dihadapi sebab fasilitas penunjang serta kebijakan redaksi media masih cenderung bias gender (Angkat, 2018). Pengalaman perempuan jurnalis Tempo.co saat diteror kepala babi pada awal 2025 lalu, memperlihatkan bahwa risiko kerja jurnalistik tidak berhenti di ruang redaksional, melainkan menembus ruang domestik dan keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi para perempuan jurnalis terutama perempuan (Danar, 2025).

Konflik peran memiliki beberapa dimensi yang membuatnya semakin kompleks. Dimensi itu terbagi menjadi dua yakni (1) *Work-Family Interface (WFI)*, yakni konflik yang muncul akibat permasalahan pekerjaan yang terbawa ke dalam keluarga sehingga mengganggu tanggung jawab peran dalam keluarga; dan (2) *Family–Work Interface (FWI)*, yaitu konflik yang disebabkan oleh permasalahan keluarga yang terbawa ke dalam dunia kerja sehingga tanggung jawab dalam peran pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara optimal (Beutell & O'Hare, 2018).

Dalam konteks ini, jenis konflik yang mungkin muncul dalam kehidupan individu yang menjalani peran ganda seperti perempuan jurnalis meliputi: (1) *Time-*

Based Conflict, yaitu konflik yang terjadi akibat pembagian waktu untuk menjalankan dua peran yang berbeda; (2) *Strain-Based Conflict*, yaitu konflik yang muncul akibat dominasi salah satu peran sehingga menyulitkan pelaksanaan peran lainnya secara optimal; dan (3) *Behavior-Based Conflict*, yaitu konflik yang muncul akibat perbedaan antara ekspektasi dan realitas peran yang dijalani (Lapierre, et al., 2018).

2.2.2 Gender Perempuan

2.2.2.1 Gender dan Ketidaksetaraan Gender

Gender merupakan sebuah istilah yang sering diidentikan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin (Nurhasanah & Zuriatin, 2023). Gender merujuk pada konstruksi sosial yang membedakan peran, hak, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep gender mencakup lebih dari sekadar cara orang berpikir dan bertindak. Gender juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat diorganisasikan dan bagaimana kehidupan kita dipengaruhi oleh hierarki sosial (Macionis, 2018). Secara sosial, perempuan kerap diasosiasikan dengan sifat lembut, emosional, dan keibuan, sementara laki-laki sering digambarkan sebagai sosok yang kuat, rasional, dan berwibawa (Fakih, 2008). Kontruksi ini melahirkan ketidaksetaraan gender dalam berbagai sektor, termasuk dalam lingkup pekerjaan seperti media dan jurnalistik yang sejak lama dibentuk oleh nilai-nilai maskulin.

Dalam konsep ketidaksetaraan gender, ada sejumlah dimensi utama yang melingkupunya, antara lain (1) Dimensi ekonomi, terkait perbedaan akses terhadap pekerjaan, upah, sumber daya ekonomi, dan asset; (2) Dimensi pendidikan, terkait ketimpangan dalam akses dan pencapaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan; (3) Dimensi kesehatan dan reproduksi, terkait ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan reproduktif, serta kontrol atas tubuh dan hak reproduksi; (4) Dimensi politik dan representasi, terkait ketimpangan dalam representasi dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan publik; (5)

Dimensi sosial dan budaya, terkait norma dan nilai budaya yang menormalisasi diskriminasi gender, stereotip peran gender, dan praktik tradisional merugikan; dan (6) Dimensi hukum dan hak asasi, terkait ketimpangan perlindungan hukum antara gender, baik dalam hukum formal maupun hukum adat (Sitorus, 2016). Keenam dimensi ini menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana ketimpangan gender bekerja pada level struktural, termasuk di ruang redaksi.

Dalam dunia jurnalistik, konstruksi gender tersebut berkelindan dengan stereotipe bahwa jurnalis adalah profesi berisiko, mobile, dan menuntut ketahanan tinggi sebagai atribut yang lebih sering dilekatkan pada laki-laki. Sementara itu, perempuan ditempatkan pada ranah domestik dan peran-peran yang dianggap “lembut” sehingga dipersepsikan kurang cocok dengan karakter kerja media. (Stellarosa & Silaban, 2019). Akibatnya, perempuan jurnalis menghadapi hambatan yang bersifat kultural maupun struktural, termasuk beban domestik yang tidak proporsional, jam kerja tidak menentu, hingga tuntutan ketersediaan penuh yang melekat pada profesi ini (Urbanikova & Caladi, 2024).

2.2.2.2 Peran Gender dan Stereotip Gender

Peran gender atau *gender role* merujuk pada bagaimana seseorang beradaptasi untuk bertingkah laku dengan gender masing-masing, sementara perilaku tersebut harus berkesinambungan dengan budaya tempat individu tersebut berasal (Matsumoto & Juang, 2013). *Gender role* berkaitan erat dengan fungsi kognitif atau persepsi individu, yang melalui proses tersebut terbentuk pemahaman mengenai bagaimana seseorang seharusnya bersikap, berperilaku, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya (Gunawan & Tobing, 2023). Secara historis, konstruksi peran gender menempatkan laki-laki dalam ranah kerja yang berkaitan dengan ruang publik, sementara perempuan diposisikan terutama dalam wilayah domestik. Pola ini diwariskan secara turun-temurun dan membentuk asumsi bahwa proses psikologis antara laki-laki dan perempuan berkembang dalam arah sikap dan orientasi yang berbeda. Stereotip gender terbentuk dan direproduksi

dalam masyarakat melalui proses sosialisasi sejak masa kanak-kanak hingga remaja, yang melibatkan peran orang tua, pendidik, kelompok sebaya, serta media massa.

Keberadaan stereotip gender turut memengaruhi pola perilaku individu, di mana perempuan secara tidak disadari cenderung diarahkan untuk lebih menekankan kualitas seperti daya tarik, kehangatan, dan sikap suportif, dibandingkan karakter yang bersifat agresif (Widyani, Saman, & Umar, 2023). Selain itu, perempuan umumnya lebih memilih pendekatan kolaboratif daripada kompetitif, lebih terbiasa mendengarkan dalam interaksi, serta lebih mengandalkan relasi interpersonal sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dibandingkan dengan menonjolkan kompetensi atau keahlian secara langsung.

Terbentuknya persepsi mengenai peran gender secara tidak langsung dapat memunculkan adanya stereotip gender *gender stereotyping* dalam seseorang atau sudut pandang yang menggeneralisasi mengenai atribut, peran, dan karakteristik spesifik yang seharusnya dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Pada perempuan, stereotip yang berkembang di masyarakat adalah anggapan bahwa perempuan mampu melakukan kerja-kerja multitasking yang lebih baik daripada laki-laki. Namun demikian, temuan empiris mengenai perbedaan gender dalam kinerja multitasking menunjukkan hasil yang tidak konsisten (Rahmawati, Agustin, & Putri, 2018).

Stereotip gender merupakan cara pandang suatu masyarakat yang menempatkan entitas hierarki dalam sebuah hubungan berkaitan dengan jenis kelamin seseorang (Widyani, Saman, & Umar, 2023). Riswani (2015) juga mengungkap bahwa stereotip gender lahir dari adanya pengkategorian perempuan dan laki-laki di dunia sosial atau label yang diberikan masyarakat untuk membedakan peran peremoyan dan laki-laki untuk menjadi ciri khas masing-masing. Stereotip gender sendiri, dibagi menjadi tiga macam, yakni (1) stereotip berdasarkan jenis kelamin; (2) stereotip berdasarkan etnis; (3) stereotip berdasarkan agama (Riswani, 2015). Dari ketiga jenis tersebut, kategori stereotip sebagai

pemikiran sosial, kerap menimbulkan bias gender/ketidaksejajaran gender. Ketidaksejajaran stereotip gender dapat dilihat dalam perlakuan masyarakat terhadap perempuan khususnya dalam pemilihan karier.

2.2.2.3 Patriarki

Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam struktur kekuasaan, baik di dalam keluarga maupun masyarakat secara luas, meskipun meskipun sistem ini tidak bersifat universal dan tidak sepenuhnya berakar pada faktor biologis (Macionis, 2018). Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patriarki adalah sistem kekerabatan yang mementingkan garis keturunan dari pihak laki-laki, dan istilah ini kemudian berkembang untuk menggambarkan struktur sosial yang memberikan otoritas utama kepada laki-laki dalam berbagai ranah kehidupan.

Dalam masyarakat pra-industri, keterbatasan perempuan dalam mengendalikan kehamilan dan persalinan turut membatasi ruang gerak dan pilihan hidup mereka. Pada saat yang sama, perbedaan tinggi badan dan kekuatan fisik laki-laki dipandang sebagai sumber daya bernilai yang memperkuat legitimasi kekuasaan laki-laki. Namun, proses industrialisasi, termasuk perkembangan teknologi pengendalian kelahiran, telah memperluas pilihan hidup individu, sehingga perbedaan biologis tidak lagi memberikan dasar yang kuat untuk membenarkan keberlanjutan patriarki dalam masyarakat modern (Macionis, 2018).

Dalam masyarakat yang berakar pada budaya patriarki, perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang secara alamiah harus menjalankan tugas domestik, sementara laki-laki mendominasi ranah public (Macionis, 2018). Gerda Lerner dalam Bhasin (2016), menjelaskan bahwa pandangan tradisional yang bersumber dari tafsir agama maupun asumsi ilmiah menganggap subordinasi perempuan sebagai sesuatu yang bersifat kodrat, tidak dapat diubah, dan telah berlangsung secara turun-temurun.

Pandangan ini berakar dari pembagian kerja sosial yang didasarkan pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Karena perempuan mampu melahirkan dan mengasuh anak, maka peran mereka diasosiasikan dengan pengasuhan dan rumah tangga. Sebaliknya, karena laki-laki memiliki kekuatan fisik yang lebih besar, mereka dianggap lebih pantas menjadi pencari nafkah (Supatmiyati, 2025). Dengan demikian, ketimpangan gender dianggap sebagai sesuatu yang "alamiah", bukan hasil dari konstruksi sosial yang bisa dikritisi.

Konstruksi patriarki semacam ini berdampak langsung pada kehidupan perempuan, termasuk dalam bentuk beban ganda (*double burden*), yaitu ketika perempuan diharuskan menjalankan dua peran sekaligus: sebagai pekerja di ranah publik dan sebagai pengelola urusan domestik di rumah (Nadhifah, Anjani, & Honest, 2025). Putu (2012) mencatat bahwa perempuan bekerja tidak hanya untuk menambah penghasilan, tetapi juga untuk menghindari kejemuhan, menyalurkan minat atau keahlian, mencari status sosial, dan mengembangkan diri. Namun, meskipun perempuan aktif dalam sektor kerja, mereka tetap dibebani ekspektasi untuk bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem patriarki terus mengekalkan peran tradisional perempuan, terlepas dari keterlibatan mereka dalam ruang publik.

Sistem patriarki menciptakan proses marginalisasi terhadap perempuan. Marginalisasi di sini berarti terpinggirkannya perempuan dari akses terhadap sumber daya dan lembaga-lembaga utama seperti ekonomi, pendidikan, serta politik. Alamona (2017) menegaskan bahwa marginalisasi perempuan bukanlah fenomena baru, melainkan telah menjadi bagian dari budaya sosial yang mengakar. Ketika perempuan dikeluarkan dari ruang-ruang strategis pengambilan keputusan, maka kontribusi mereka terhadap pembangunan pun berkurang secara signifikan.

Dalam budaya patriarki, pelabelan negatif terhadap perempuan juga sering ditemukan dalam bentuk stereotipe. Natha (2017) menjelaskan bahwa stereotipe

adalah cara pandang yang dibentuk secara kolektif terhadap suatu kelompok sosial, yang kemudian digunakan untuk memengaruhi cara masyarakat memperlakukan kelompok tersebut. Dalam konteks gender, pelabelan semacam ini dapat berupa anggapan bahwa perempuan bersifat emosional, tidak rasional, mudah menangis, dan kurang mampu mengambil keputusan penting. Stereotip tersebut memperkuat asumsi bahwa perempuan hanya cocok untuk menjalankan peran domestik dan menjadi pelengkap ekonomi rumah tangga, sementara laki-laki tetap dianggap sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama (Maghfiro & Sadewo, 2025). Pelabelan semacam ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang, di mana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat yang harus tunduk pada dominasi laki-laki.

Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan juga membuka ruang terjadinya kekerasan berbasis gender. Margani (2018) mencatat bahwa perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, baik secara fisik, seksual, maupun emosional, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Relasi yang tidak seimbang menjadikan perempuan rentan menjadi objek kekerasan karena dianggap sebagai milik atau bagian dari otoritas laki-laki. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga dilembagakan dalam sistem sosial dan kultural yang melegitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan.

Patriarki tidak hanya bekerja dalam struktur sosial, tetapi juga tertanam dalam nilai-nilai budaya dan sistem pendidikan yang berlangsung sejak dulu (Maghfiro & Sadewo, 2025). Sebagai contoh, dalam masyarakat tradisional seperti di Hulu Sungai, Kalimantan Selatan, perempuan seringkali harus mengorbankan pendidikan demi menjalankan tanggung jawab domestik, seperti menjaga adik-adik ketika orang tua pergi bekerja. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai patriarkal ditanamkan melalui institusi keluarga dan pendidikan, membentuk norma yang mengekang perkembangan perempuan sejak usia dini.

Dengan demikian, patriarki bukan sekadar persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan sistem sosial yang menyeluruh dan terstruktur. Sistem ini mengakar dalam norma, nilai, institusi, serta praktik keseharian masyarakat yang secara sadar maupun tidak sadar menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

2.2.3 Jurnalisme Media Online

2.2.3.1 Jurnalis

Jurnalis merupakan seseorang yang terlibat dalam profesi atau pekerjaan yang berkaitan dengan publikasi informasi melalui suatu media berita (Forst, 2021). Sementara Queensland (2024) mendefinisikan jurnalis sebagai orang yang terlibat dalam pekerjaan menulis atau menyunting materi yang dimaksudkan untuk dipublikasikan dalam media berita cetak atau elektronik. Dalam definisi ini, jurnalis tetap dibatasi pada bentuk pekerjaan tertentu, namun aktivitasnya dipersempit pada “menulis dan menyunting”, serta hanya dapat melakukan publikasi melalui media berita “cetak atau elektronik”.

Jurnalis di Indonesia, menjalankan tugasnya dengan mengacu pada kode etik yang disusun oleh Dewan Pers. Adapun tugas-tugasnya, yakni menyampaikan informasi dalam dari berbagai data yang dikumpulkan dan menyajikannya dalam format berita (Tenda, 2024). Dalam pengumpulan berita tersebut, wartawan tidak bisa hanya berkutat di satu topik, melainkan beragam seperti sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu sebagai wartawan dituntut bisa menguasai semua topik dengan baik agar dalam penyampaian berita mudah di mengerti oleh para pembaca (Temanggung, 2013).

Wartawan dituntut untuk memiliki kesadaran penuh terhadap perannya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara akurat, cepat, dan berlandaskan kebenaran. Secara normatif, wartawan berkewajiban menghasilkan

karya jurnalistik yang berkualitas serta relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Di samping itu, profesi wartawan melekatkan tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab tersebut muncul dari posisinya yang tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat, di mana setiap keputusan dan tindakannya berpotensi memengaruhi pihak lain (Sulistiono, 2013). Oleh karena itu, wartawan memiliki tanggung jawab kepada publik untuk menyajikan informasi yang akurat, jujur, dan faktual. Lebih jauh, wartawan dituntut untuk menumbuhkan kepekaan moral dan naluri etis dalam dirinya sebagai landasan untuk bertindak demi kebaikan bersama (Tenda, 2024).

Dewan Pers menuliskan beberapa hal yang menjadi tugas-tugas wartawan, di antaranya:

1. Tanggung Jawab

Jurnalis bertugas untuk mengabdi pada kepentingan publik dengan menyediakan informasi yang memungkinkan masyarakat membentuk penilaian atas persoalan yang mereka hadapi. Jurnalis tidak diperbolehkan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan jurnalistik untuk kepentingan pribadi maupun tujuan yang tidak memiliki dasar kepentingan publik.

2. Kebebasan

Jurnalis memiliki peran untuk memastikan bahwa urusan publik diselenggarakan secara terbuka. Dalam menjalankan fungsinya, jurnalis harus menentang segala bentuk upaya yang memanfaatkan pers demi keuntungan individu atau kelompok tertentu.

3. Independensi

Jurnalis dituntut untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). Jurnalis tidak boleh menerima imbalan atau keuntungan dari

narasumber, maupun terlibat dalam aktivitas yang dapat menggerus integritasnya sebagai penyampai informasi dan kebenaran.

4. Kebenaran

Jurnalis berfungsi sebagai representasi penglihatan, pendengaran, dan kepekaan publik. Oleh karena itu, jurnalis harus terus menjaga kepercayaan khalayak dengan memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat akurat, berimbang, dan bebas dari keberpihakan.

5. Tidak Memihak

Jurnalis perlu membuat penyajian berita dan opini yang dipisahkan secara tegas. Setiap tulisan yang bersifat opini wajib diberi penanda yang jelas agar tidak disalahartikan sebagai laporan fakta.

6. Adil dan Ksatria (Fair)

Jurnalis berkewajiban menghormati hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam pemberitaan, serta mempertanggungjawabkan kepada publik bahwa berita yang disajikan disusun secara akurat dan sesuai dengan prinsip keadilan (dewanpers.or.id, 2025).

2.2.3.2 Media Online

Media adalah alat atau saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pihak pengirim (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan). Dalam konteks ilmu komunikasi, media memiliki peran krusial sebagai perantara dalam proses penyebaran informasi, ide, dan nilai-nilai dalam masyarakat. McQuail (2010) mendefinisikan media sebagai institusi dan teknologi yang terorganisasi untuk produksi dan distribusi pesan dalam ruang public.

Media tidak hanya mencakup media massa tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi, tetapi juga media baru seperti internet dan platform digital yang memungkinkan komunikasi dua arah dan interaktif. Kehadiran media baru telah mengubah lanskap komunikasi global, menghadirkan ruang diskusi yang lebih terbuka dan partisipatif, sekaligus menimbulkan tantangan baru seperti disinformasi dan polarisasi publik (Lievrouw & Livingstone, 2006).

Menurut McLuhan (1964), media bukan hanya sebagai saluran penyampaian pesan, tetapi juga membentuk cara manusia berpikir dan berinteraksi. Ungkapan terkenalnya "*the medium is the message*" menekankan bahwa karakteristik media itu sendiri memiliki dampak besar terhadap masyarakat, bukan hanya isi yang disampaikan (McLuhan, 1964). Dalam hal ini, media dipandang sebagai kekuatan sosial yang mampu membentuk opini publik, nilai budaya, dan struktur kekuasaan.

Dalam ilmu komunikasi, media diklasifikasikan berdasarkan bentuk, saluran, dan teknologinya. Secara umum, media dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama: media cetak, media elektronik, dan media baru atau digital. Masing-masing jenis memiliki karakteristik, kekuatan, dan kelemahannya tersendiri dalam menyampaikan pesan kepada khalayak (McQuail, 2010).

1. Media Cetak (*Print Media*)

Media cetak adalah media yang menyampaikan informasi melalui bahan cetakan, seperti kertas. Contohnya termasuk surat kabar, majalah, buletin, dan pamflet. Media cetak dikenal karena sifatnya yang permanen, dapat dibaca berulang kali, dan memungkinkan penyampaian informasi yang mendalam dan terstruktur. Namun, jangkaunya cenderung terbatas dan kurang responsif terhadap perubahan informasi secara cepat (Dominick, 2012).

2. Media Elektronik (*Electronic/online Media*)

Media elektronik mencakup saluran penyampaian informasi yang menggunakan teknologi elektromagnetik, seperti radio dan televisi. Media ini memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi secara cepat dan menjangkau khalayak luas dalam waktu singkat. Radio efektif untuk audiens yang mobile, sementara televisi menggabungkan unsur audio dan visual, menjadikannya sangat menarik secara emosional dan informatif (Baran, 2015).

3. Media Baru atau Media Online (*New Media/Digital Media*)

Media baru merujuk pada media berbasis teknologi digital dan internet, seperti media sosial, situs web, podcast, dan aplikasi mobile. Media ini bersifat interaktif, personal, dan memungkinkan komunikasi dua arah antara pengirim dan penerima pesan. Kehadiran media digital telah merevolusi cara orang berkomunikasi, memproduksi, dan mengakses informasi. Media ini juga memungkinkan personalisasi pesan dan partisipasi aktif dari khalayak (Lister, Dovey, Giddings, Grant, & Kelly, 2009)

Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah media baru atau media online. Media online di Indonesia mulai mendapat perhatian luas pasca-reformasi 1998, ketika kehadiran media digital menjadi alternatif dalam menyampaikan berita dengan lebih cepat dan terbuka (Anggreswari & Puteri, 2021). Perkembangan tersebut juga turut melahirkan berbagai bentuk jurnalisme baru seperti *mobile journalism* dan *citizen journalism* sebagai kegiatan jurnalistik atau penyebaran konten melalui medium internet dengan karakteristik, norma, dan proses kerja yang berbeda dari jurnalisme konvensional (Muhammed, Lawal, & Sanusi, 2024). Media online tidak hanya sekadar memindahkan aktivitas peliputan dan penyiaran berita ke ruang digital, melainkan juga melahirkan cara pandang baru tentang produksi, distribusi, dan konsumsi informasi. (Romli A. S., 2012).

Karakter digital yang melekat pada media online memungkinkan distribusi berita atau konten tanpa batas ruang dan waktu, sekaligus membuka peluang partisipasi khalayak sebagai produsen informasi. Namun, di tengah keterbukaan tersebut, media online tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi-fungsi media massa, seperti memberikan informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, sehingga kredibilitas menjadi aspek penting yang harus dijaga (Fakhruroji, Suryana, & Wahyudin, 2023).

Tidak seperti media cetak yang memiliki jadwal penerbitan tetap, media online menuntut produksi berita secara *real-time* (langsung), sehingga tekanan kerja menjadi lebih tinggi. Selain itu, model koneksi media online menggunakan *hyperlink* baik internal maupun eksternal dengan umpan balik dalam komunikasi massa dalam berbagai format (video, audio, animasi) (Muhammed, Lawal, & Sanusi, 2024). Perkembangan teknologi digital juga menuntut peningkatan keterampilan baru bagi pekerja media. Perempuan jurnalis kini diharapkan untuk menguasai berbagai teknologi digital, seperti *search engine optimization* (SEO), analisis data digital, dan strategi distribusi konten melalui berbagai *platform* media sosial (Bahri, 2018). Sayangnya, akses dan pelatihan teknologi bagi perempuan di Indonesia masih terbatas, sehingga banyak pekerja perempuan yang mengalami kesenjangan digital dibandingkan rekan laki-laki mereka (Sopiah, 2024).

2.2.4 Jurnalisme Multitasiking

Massifnya perkembangan media online dewasa ini serta oplah penjualan media cetak yang menurun, membuat banyak perubahan terjadi di dunia kerja jurnalistik (Haryanto, 2017). Perubahan kerja jurnalis salah satunya adalah dengan aktivitas *multitasking* yang membuat para jurnalis mengejakan dua atau bahkan tiga pekerjaan dalam waktu yang bersamaan hingga membuat fokusnya menjadi terbelah-belah (Nabila, Ain, & Asbari, Monotasking: Solusi Distraksi Era Modern, 2023). Namun demikian, konsep tersebut membuat khalayak dapat menikmati

produk jurnalistik dalam bentuk audio, video, foto, dan grafik interaktif secara bersamaan (Hill & Lashmar, 2014).

Meskipun ada banyak istilah untuk menggambarkan multi keahlian, namun penelitian ini menggunakan istilah *multitasking* sebagai konsep jurnalisme baru digunakan untuk menggambarkan penugasan yang berlapis dalam satu waktu. Konsep jurnalisme *multitasking* seperti yang dijelaskan Perry (2015), membuat adanya tugas-tugas krusial seperti pemeriksaan fakta, editing naskah, desain, dan jurnalis yang bekerja di lapangan bergeser menjadi hanya dikerjakan oleh satu orang yang duduk di meja dengan mesin tik sekaligus pakar media yang serba bisa. Dia tak hanya terampil dalam melakukan wawancara dan menulis artikel, tetapi juga mengambil foto, merekam video, mengedit rekaman, memeriksa fakta, mengoreksi dan menata artikel mereka, sambil tetap mempertahankan kehadiran yang kuat di sosial media (Perry, 2015).

Di Indonesia, Pratopo (2017) mengungkap bahwa jurnalis di era konvergensi saat ini, para jurnalis dihadapkan pada kerja multitasking, di mana mereka tidak hanya dituntut untuk menuliput di satu *outlet* media, tetapi juga di *outlet* lain yang masih satu grup dengan media tersebut. Selain itu, terdapat eksplotiasi relatif dengan pemberian tugas ganda di beberapa posisi atau jabatan, termasuk di luar bidang redaksi atau jurnalistik, bahkan ada seseorang yang ditugaskan empat posisi sekaligus.

Tak sampai di situ, Pratopo (2017) juga mengungkap bahwa wartawan media online di era konvergensi saat ini juga dibebankan dengan kewajiban promosi pemasaran melalui media sosial hingga penekanan target yang besar kepada wartawan agar pendapatan media meningkat. Hal tersebut sesuai dengan argument Yesilyurt dalam Khan (2022) yang berpendapat bahwa munculnya konsep *multitasking* jurnalis dalam praktik jurnalisme online, membuat beban kerja semakin tinggi dan tenggang waktu yang tidak ada habisnya. Akibatnya, peran

pekerja di ruang redaksi juga berubah. Oleh karena itu, jurnalisme *multitasking* digambarkan sebagai tuntutan untuk bisa menjalankan berbagai tugas sekaligus dan meningkatkan kinerjanya agar produk digital media mereka semakin beragam (Nabila dkk, 2023).

2.2.5 Fenomenologi Transendental

Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena yang terdiri atas apa yang mereka alami dan bagaimana mereka mengalami (Creswell & Poth, 2018). Penelitian akan berfokus pada pendekatan utama dalam studi fenomenologi yang berakar pada filsafat Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Moustakas (1994), yakni transendental. Pendekatan ini menekankan pada pengalaman subjektif murni yang dibersihkan dari prasangka dan asumsi agar peneliti bisa memahami esensi alami dari suatu fenomena (Moustakas, 1994). Edmund Husserl mengartikan fenomenologi tekait pentingnya kembali ke “hal-hal itu sendiri” (*zu den Sachen selbst*), yaitu memahami pengalaman manusia secara langsung tanpa prasangka atau asumsi teoritis sebelumnya. Artinya, pengalaman tersebut terjadi secara sadar dan merupakan pengalaman orang pertama (Widyaningtyas et al, 2023). Sehingga, semua bentuk tindakan dan keadaan kesadaran mulai dari kognitif eksplisit (seperti penilaian) hingga kesadaran indrawi, persepsi, ingatan, imajinasi, perasaan, emosi, suasana hati, kehendak bebas, hingga kesadaran waktu (*time-consciousness*), terkandung di dalamnya (Bailey, 2013).

Moustakas (1994) menambahkan, sebuah fenomena didapat secara apa adanya dalam pemikiran terbuka agar pengalaman tersebut dapat menafsirkan makna-makna. Dalam menggali sebuah fenomena dari pengalaman seseorang, perlu menekankan subjektivitas dan pengungkapan mendasar dari pengalaman dengan sebuah metodologi yang sistematis. Dalam bahasan ini, dikenal konsep-konsep kunci seperti noesis dan noema yang menjadi unit analisis fundamental dari setiap tindakan kesadaran (Husserl, 2001). Noesis merujuk pada tindakan mental

atau aktivitas kesadaran itu sendiri, yaitu cara kita mengarahkan kesadaran kita pada suatu objek. Sedangkan noema adalah objek yang disadari seperti yang muncul dalam kesadaran, atau "apa" yang disadari. Sementara Noema bukanlah objek fisik di dunia itu sendiri, melainkan objek dalam pengalaman sadar kita, lengkap dengan semua karakteristik dan maknanya seperti yang kita alami. Hubungan intensional ini, di mana kesadaran selalu mengarah pada sesuatu, adalah inti dari bagaimana pengalaman dibentuk (Husserl, 2001).

Selain itu, konsep intersubjektif juga memegang peranan krusial dalam fenomenologi transental. Husserl mengakui bahwa pengalaman kita tidak sepenuhnya terisolasi, tetapi juga dibentuk dan dipahami dalam konteks interaksi dengan kesadaran lain. Intersubjektivitas merujuk pada bagaimana peneliti memahami dan berbagi pengalaman dengan orang lain, serta bagaimana pengalaman kita sendiri dipengaruhi oleh kehadiran orang lain dan dunia bersama (Overgaard & Wejs, 2013). Ini adalah aspek fundamental untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang realitas, karena makna dan esensi seringkali bersifat intersubjektif dan bukan hanya subjektif individual.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan deskripsi secara menyeluruh untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman perempuan jurnalis di media online dalam menjalankan tugas jurnalistiknya saat pekiputan di lapangan dan di ruang redaksi, serta pemaknaan pengalaman perempuan jurnalis terhadap identitasnya.

Penjabaran fenomenologi juga akan mengacu pada yang dikemukakan oleh Husserl sebagai fenomenologi transental (*transcendental phenomenology*). Menurut Moustakas (1994), fenomenologi transental merupakan studi ilmiah yang mempelajari bagaimana sesuatu muncul atau tampak, yaitu fenomena sebagaimana kita lihat dan sadari dalam kesadaran kita. Setiap fenomena dapat dijadikan sebagai titik awal yang tepat untuk melakukan refleksi fenomenologis. Sesuatu dianggap sebagai fenomena karena kemunculannya itu sendiri. Tantangan

utama dalam fenomenologi transendental adalah menguraikan fenomena tersebut dengan melihat komponen-komponen penyusunnya serta makna-makna yang terkandung, sehingga kita dapat mengenali ciri-ciri kesadaran dan memahami inti dari pengalaman itu.

Lebih jauh, Husserl mengembangkan metode reduksi fenomenologis (*epoché*) untuk mencapai pemahaman mendalam tersebut, di mana seorang peneliti harus menangguhkan semua prasangka dan keyakinan awal agar dapat memahami esensi dari suatu pengalaman. Sebab, Husserl percaya bahwa untuk memahami satu realitas secara mendalam, perlu adanya analisis secara sadar dengan cara yang bebas dari bias dan interpretasi yang diteruskan dari ilmu pengetahuan atau teori sebelumnya (Traumingkeng, 2024). Setelah *epoché*, proses reduksi dilanjutkan dengan upaya untuk mengidentifikasi inti atau esensi dari pengalaman tersebut dengan mengabaikan unsur-unsur non-esensial.

Epoché yang digambarkan oleh Husserl (1983) memungkinkan peneliti untuk mengisolasi pengalaman subjek tanpa terpengaruh oleh bias atau asumsi eksternal. Dengan menghilangkan elemen-elemen non-esensial, peneliti dapat menemukan inti dari pengalaman tertentu yang dialami oleh perempuan jurnalis (Husserl, 1983). Epoche digunakan untuk mengisolasi pengalaman subjek tanpa terpengaruh oleh bias atau asumsi eksternal, dengan begitu pengalaman yang dimiliki objek akan bersifat murni tanpa interpretasi dan campur tangan peneliti. Nantinya, konsep tersebut akan menjadi kerangka teoritis yang kuat untuk memahami pengalaman subjektif seseorang yang diteliti (Creswell & Poth, 2018).

Ada tiga tahapan deskripsi dalam fenomenologi transendental yang saling terkait, yakni analisis tekstural, struktural, dan komposit tekstural-struktural (Moustakas, 1994). Analisis Tekstural berfokus pada "apa" yang dialami oleh partisipan. Ini melibatkan deskripsi yang kaya dan detail dari pengalaman langsung partisipan, menangkap ungkapan verbal, emosi, dan persepsi mereka dalam bentuk narasi (Moustakas, 1994). Tujuannya adalah untuk menghadirkan pengalaman

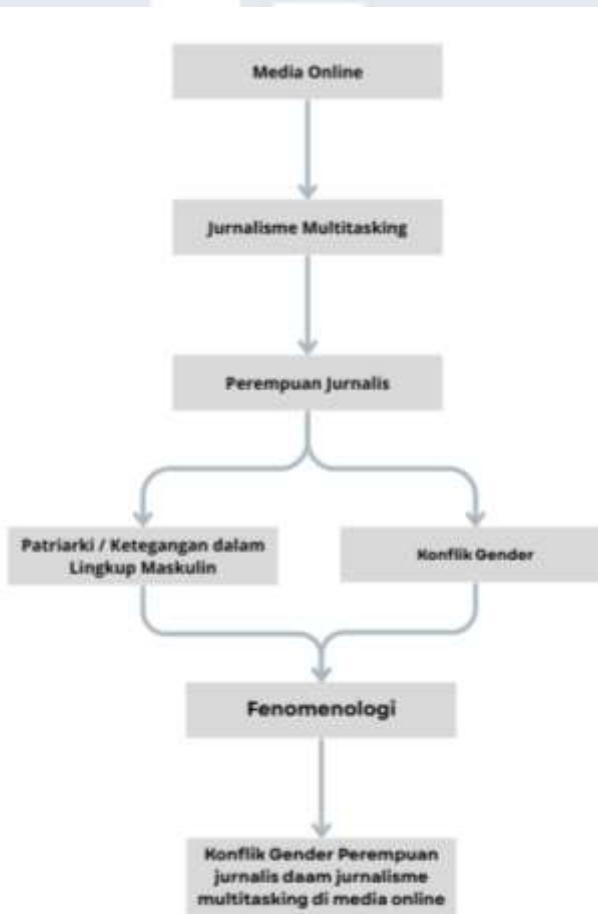
subjek sebagaimana adanya, dengan setia pada kata-kata dan makna yang disampaikan. Sementara analisis struktural, berpusat pada "bagaimana" pengalaman itu terjadi. Ini melibatkan identifikasi konteks, kondisi, dan faktor-faktor yang membentuk pengalaman tersebut. Peneliti mencari pola, tema, dan dimensi yang mendasari pengalaman, mengungkap struktur fundamental yang memungkinkan pengalaman tersebut terwujud (Moustakas, 1994).

Adapun Sintesis/Komposite Tekstural-Struktural menyatukan kedua dimensi ini. Ini adalah deskripsi menyeluruh yang mengintegrasikan "apa" yang dialami dengan "bagaimana" itu dialami, sehingga membentuk gambaran esensi yang koheren dari fenomena yang diteliti (Moustakas, 1994). Deskripsi komposit ini merupakan sintesis yang menangkap makna inti dan struktur universal dari pengalaman di antara beberapa partisipan.

2.3 Alur Penelitian

Konflik Peran dan Jurnalisme Multitasking (Studi Fenomenologi tentang Pengalaman Dunia Kerja Perempuan Jurnalis Media Online)

Gambar 2. 1 Alur Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti, 2025